

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)  
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
TAHUN ANGGARAN 2019-2023**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



**DIANI FITRI**  
**NIM. B1032211033**

**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**2025**

**LEMBAR YURIDIS**


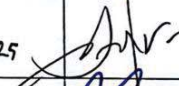
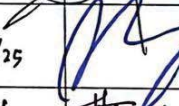

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SISA LEBIH  
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2019-2023**

**Penanggung Jawab Yuridis**

  
**Diani Fitri**  
B1032211033

Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 16 Juli 2025

**Majelis Penguji**

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS., ACPA., CFA., CMA NIP. 198207192005011001	22/7/25	
2.	Sekretaris Penguji	Dr. Vitriyan Espa, S.E., MSA., Ak., CA., CHt NIP. 197809062005011002	12/7/25	
3.	Penguji 1	Dr. Muhsin, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA., CPA NIP. 197210012006041001	12/7/25	
4.	Penguji 2	Tiya Nurfauziah, S.Ak., M.Ak NIP. 199709302022032017	16/7/2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus  
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif



**28 JULI 2025**

Koordinator Program Studi Akuntansi

**Dr. Kristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA**  
197906182002122003

## **PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diani Fitri  
Nim : B1032211033  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : SI Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih  
Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dalam Pengelolaan  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)  
Tahun Anggaran (2019-2023)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber data dan informasi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 28 Juli 2025



Diani Fitri  
NIM. B1032211033

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : Diani Fitri  
NIM : B1032211033  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih  
Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dalam Pengelolaan  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun  
Anggaran 2019-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya peneliti sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti peneliti melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 14 Agustus 2025



Diani Fitri

B1032211033

## MOTTO

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

*"Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita".*

(QS. At-Taubah Ayat 40)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ

*"Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah □ akan memudahkan baginya jalan untuk ke surga. Sesungguhnya Malaikat meletakkan sayapnya untuk menaungi penuntut ilmu kerana rela atas apa yang dilakukannya".*

(HR. Al-Baihaqi)

*"Barangsiapa yang memudahkan urusan orang lain yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat baginya".*

(Sabda Rasulullah SAW dalam HR. Muslim)

*"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan"*

(Maudy Ayunda)

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis faktor penyebab terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019-2023" ini tepat pada waktunya. Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan baik berupa bimbingan, arahan, Kerjasama dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, terutama kepada kedua orang tua penulis yang telah mendukung penulis dengan selalu memberikan do'a tiada henti untuk penulis agar selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, serta bantuan secara materil untuk menyelesaikan studi.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dengan sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA, CMA, CPA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Bapak Syarif M. Helmi, S.E., M.Ak, selaku Sekretaris Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

6. Ibu Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak, CA. selaku Koordinator Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
7. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc. CSRS, ACPA, CFrA, CMA, CAPM, CAPF selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkan beliau untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik, saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Vitriyan Espa, S.E., MSA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkan beliau untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik, saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Muhsin, SE, M.Si, Ak., CA selaku dosen penguji penulis.
10. Ibu Tiya Nurfauziah, S.Ak, M.Ak, selaku dosen penguji penulis.
11. Kedua orang tua tersayang Papa dan Mama yaitu Asep Andriana dan In Efriyanti. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan.
12. Teman-teman Akuntansi Kelas B Sore Angkatan 2021, Muhammad Riski, Muhammad Ananda Widyanata dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terima kasih atas kerjasama, dukungan dan semangat yang telah dilakukan semasa di bangku perkuliahan.
13. Sahabat seperjuangan Laras, Sintiya, Safitri, Siwi, Ifah, Firli, Utin yang merupakan sahabat sejak bangku perkuliahan yang semasa kuliah selalu mengerjakan tugas bersama, yang saling mengingatkan absen dan tugas kuliah serta memberikan bantuan dan arahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Sebagai manusia, peneliti menyadari bahwasanya masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti baik dari segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyusunan karya sehingga dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan hal positif bagi pembaca.

Pontianak, 29 Agustus 2025

Penulis,

**Diani Fitri**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM  
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2019-2023**

Oleh:

**Diani Fitri**

Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Tanjungpura

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta fluktuasi nilai SILPA pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan Studi Kasus. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa Laporan Realiasi Anggaran (LRA) serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kasubbid Pelaporan dan Akuntansi Wilayah 1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa SILPA terjadi akibat pelampauan pendapatan, rendahnya realisasi belanja, serta berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan anggaran. Adapun fluktuasi nilai SILPA selama lima tahun terakhir disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, pembiayaan netto tidak mampu menutupi defisit, serta lonjakan nilai SILPA pada tahun 2022.

**Kata Kunci : LRA, SILPA, fluktuasi anggaran**

***ANALYSIS OF THE CAUSING FACTORS OF THE BUDGET FINANCING  
SURPLUS (SILPA) IN THE MANAGEMENT OF THE REGIONAL  
REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBD)  
FOR THE 2019-2023 FISCAL YEAR***

*By:*

**Diani Fitri**

*Accounting Department  
Faculty of Economics and Business  
University of Tanjungpura*

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the factors causing the occurrence of Budget Surplus (SILPA) and fluctuations in the SILPA value at the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of West Kalimantan Province during the 2019-2023 period. This study uses a qualitative research type with a Case Study approach. The data used consists of secondary data in the form of the Budget Realization Report (LRA) and primary data obtained through interviews with the Head of the Reporting and Accounting Sub-Division for Region 1. The results of the study show that SILPA occurs due to excess revenue, low spending realization, and various technical obstacles in budget implementation. The fluctuation in the SILPA value over the past five years was caused by an imbalance between revenue and spending, net financing unable to cover the deficit, and a spike in the SILPA value in 2022.*

***Keywords: LRA, SILPA, budget fluctuations***

## **RANGKUMAN ISI SKRIPSI**

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2019-2023**

#### **1. Latar Belakang**

Sejak penerapan otonomi daerah pada tahun 2000, pemerintah pusat mulai mendesentralisasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengatasi ketimpangan fiskal. Desentralisasi bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, yang diwajibkan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dokumen perencanaan keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan ini harus dilakukan secara tertib, taat hukum, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. APBD berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal daerah dan dokumen penganggaran tahunan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD melalui RKA dan DPA SKPD.

Pelaksanaan APBD wajib dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang salah satu komponennya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi alat evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam mengukur efektivitas realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selisih antara realisasi dengan anggaran akan membentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Idealnya, APBD disusun dengan asumsi SiLPA nol. Namun, kenyataannya, SiLPA hampir selalu muncul pada akhir tahun anggaran, baik dalam bentuk positif maupun negatif. SiLPA positif menunjukkan adanya sisa kas setelah dikurangi pembiayaan dan defisit, sementara negatif menunjukkan pembiayaan tidak mencukupi untuk menutupi defisit. SiLPA kemudian dimanfaatkan kembali pada anggaran tahun berikutnya sebagai sumber pembiayaan. Dalam praktiknya, SiLPA juga mencerminkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran berjalan. SiLPA tinggi bisa mencerminkan ketidakefisienan dalam penyerapan anggaran atau kesalahan perencanaan teknis. Sebaliknya, SiLPA yang wajar dan terukur dapat menjadi indikator efisiensi dan pengendalian yang baik.

Di Provinsi Kalimantan Barat, selama tahun anggaran 2019–2023, nilai SiLPA menunjukkan fluktuasi. Penurunan tajam terjadi pada 2019–2021, kemudian melonjak signifikan pada 2022, dan kembali menurun pada 2023. Lonjakan SiLPA tahun 2022 mencapai Rp 712,77 miliar, yang menjadi tertinggi selama lima tahun terakhir. Sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2021. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya optimal, khususnya pada aspek penyerapan belanja dan proyeksi pendapatan. Beberapa penelitian terdahulu seperti oleh Fitri Amelia et al. (2022), Solga Safitri et al. (2022), dan Mochammad Fitroh et al. (2016), menunjukkan hasil yang beragam mengenai penyebab SiLPA, mulai dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, hingga keterkaitan dengan penentuan APBD tahun berikutnya.

Dengan mempertimbangkan pentingnya SiLPA sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah serta dampaknya terhadap efisiensi anggaran dan pelaksanaan pembangunan, maka perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA dan fluktuasinya di Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam pengelolaan APBD yang lebih efektif dan akuntabel.

## **2. Rumusan Masalah**

Apa faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA dalam waktu kurun 5 tahun terakhir pada Laporan Realisasi APBD (2019-2023) dan Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi nilai SILPA?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya SILPA dan fluktuasi nilai SILPA di BKAD selama periode 2019-2023.

## **4. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realiasi Anggaran (LRA) serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kasubbid Pelaporan dan Akuntansi Wilayah I. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

## **5. Hasil dan Pembahasan**

### **a. Perbandingan Anggaran dengan Realisasi**

Data LRA 2019–2023 menunjukkan bahwa pendapatan daerah secara umum terealisasi cukup baik, bahkan melebihi anggaran di beberapa tahun seperti 2019 dan 2022. Namun, realisasi belanja selalu berada di bawah anggaran, menunjukkan lemahnya daya serap anggaran oleh SKPD. Hal ini memunculkan potensi terbentuknya SILPA setiap tahun.

### **b. Analisis Kinerja Pelaksanaan APBD**

Analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019–2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD belum sepenuhnya efektif. Hal ini tercermin dari pola pelampauan pendapatan dan sisa belanja yang berulang setiap tahun. Pelampauan pendapatan hanya terjadi pada 2019 dan 2022, sementara pada 2020, 2021, dan 2023, realisasi pendapatan lebih rendah

dari target. Di sisi lain, realisasi belanja selalu lebih rendah dari pagu anggaran, menghasilkan sisa belanja yang signifikan setiap tahunnya.

**c. Analisis Perhitungan SILPA**

Perhitungan SILPA dilakukan sesuai SAP Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

$SILPA = (\text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Netto})$ . Hasil menunjukkan fluktuasi SILPA selama lima tahun terakhir. Tiga tahun pertama (2019–2021) mencatat SILPA negatif karena pembiayaan tidak cukup menutup defisit, sedangkan tahun 2022–2023 mencatat SILPA positif karena pendapatan tinggi dan pembiayaan optimal.

**d. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan informan BKAD mengungkapkan adanya sejumlah hambatan teknis dan kebijakan yang mempengaruhi realisasi belanja, seperti proses pengadaan yang lambat, perubahan regulasi, serta belanja yang tidak bisa dicairkan karena tidak lengkap dokumennya. Informan menekankan bahwa SILPA yang terlalu besar mengindikasikan lemahnya perencanaan anggaran.

**e. Pola dan Tren SILPA 2019-2023**

SILPA mengalami fluktuasi signifikan negatif di 2019–2021 dan melonjak drastis pada 2022 hingga kembali menurun di 2023. Pola ini mencerminkan belum optimalnya pengelolaan siklus anggaran, khususnya dalam keselarasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

**f. Faktor-faktor penyebab terjadinya SILPA**

Faktor-faktor penyebab terjadinya SILPA di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama 2019–2023 mencakup tiga aspek utama, yaitu pelampauan pendapatan, rendahnya realisasi belanja, dan kendala teknis dalam pelaksanaan anggaran. Pelampauan pendapatan, seperti yang terjadi pada tahun 2019 dan 2022, menciptakan kelebihan kas yang tidak dapat langsung dibelanjakan karena tidak tercantum dalam APBD, sehingga akhirnya menjadi SILPA. Di sisi lain, realisasi belanja yang selalu di bawah pagu menunjukkan lemahnya daya serap anggaran, baik

akibat efisiensi selama pandemi maupun program yang tidak terlaksana. Selain itu, kendala teknis seperti keterlambatan lelang, pencairan anggaran menjelang akhir tahun, serta perbedaan data antara SIPD dan realisasi, turut memperbesar SILPA. Hasil Wawancara dengan Informan menguatkan bahwa meskipun pendapatan melampaui target, jika belanja tidak terserap maksimal dan ada hambatan teknis, maka sisa anggaran akan terus terbentuk dan mengendap di kas daerah.

**g. Penyebab Fluktuasi Nilai SILPA**

Fluktuasi SILPA Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019–2023 disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, ketidaktepatan pembiayaan netto dalam menutup defisit, serta lonjakan pada tahun 2022. Realisasi belanja yang selalu lebih rendah dari anggaran menyebabkan sisa anggaran terbentuk setiap tahun, sementara pendapatan bersifat fluktuatif, hanya melampaui target pada tahun 2019 dan 2022. Di sisi lain, pembiayaan netto pada tahun 2019–2021 tidak mampu menutup defisit anggaran, menyebabkan SILPA negatif, sedangkan tahun 2022–2023 menunjukkan pembiayaan yang lebih efektif. Lonjakan SILPA tertinggi terjadi pada 2022, disebabkan oleh pelampauan pendapatan yang signifikan, serapan belanja yang rendah, serta pembiayaan yang optimal mengindikasikan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara keseluruhan.

**h. Dampak SILPA**

Informan mengungkapkan bahwa SILPA memiliki dampak positif maupun negatif tergantung pada pengelolaannya. Secara positif, SILPA mencerminkan adanya sisa kas yang dapat dimanfaatkan untuk program prioritas di tahun berikutnya, seperti infrastruktur atau layanan publik, selama digunakan sesuai peruntukan dan diawasi secara ketat oleh legislatif dan eksekutif. Namun, SILPA yang terlalu besar menandakan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas dan menghambat pelaksanaan program di awal tahun. Informan menegaskan bahwa

SILPA bukanlah hal negatif jika dikelola dengan tepat, namun besarnya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

**i. Evaluasi dan Pengawasan SILPA**

Evaluasi dan pengawasan terhadap SILPA di Pemerintah Daerah dilakukan oleh TAPD yang melibatkan SEKDA, BKAD, dan BAPEDA, dengan tujuan menilai realisasi anggaran dan memastikan penggunaan SILPA sesuai peruntukannya sebelum APBD tahun berikutnya disahkan. BKAD dan BAPEDA memetakan pemanfaatan SILPA ke dalam program SKPD, didukung pelaporan serapan anggaran bulanan dari SKPD dan rekonsiliasi triwulanan untuk menjaga akurasi data. Evaluasi juga mencakup identifikasi program yang tidak terealisasi agar dapat dianggarkan kembali. Informan menekankan bahwa tidak seluruh SILPA dapat digunakan secara fleksibel misalnya, SILPA dari BOS, BLUD, dan DAK harus kembali ke program asalnya sedangkan SILPA dari pelampauan PAD cenderung lebih bebas dimanfaatkan untuk mendukung program strategis tahun berikutnya.

**j. Upaya Pengendalian SILPA**

Hasil wawancara dengan Informan menunjukkan bahwa upaya pengendalian SILPA dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang di tingkat SKPD, termasuk perencanaan anggaran kas yang rinci agar pendapatan dan belanja seimbang. Informan menekankan pentingnya menghindari pelaksanaan proyek fisik di akhir tahun dan mendorong percepatan lelang serta pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun. Inovasi, seperti penggunaan teknologi untuk efisiensi biaya, juga dianjurkan. Selain itu, pengendalian dilakukan melalui pelaporan serapan anggaran bulanan oleh SKPD dan rekonsiliasi triwulanan sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020 untuk memastikan akurasi data belanja dan pendapatan. Seluruh langkah ini ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi kepentingan masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>LEMBAR YURIDIS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>RANGKUMAN ISI SKRIPSI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.5 Kontribusi Penelitian.....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ) .....	9
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	10
2.1.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) .....	24
2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran .....	28
2.2 Kajian Empiris.....	33
2.3 Kerangka Konseptual .....	42
<b>BAB III</b> .....	<b>43</b>

<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1    Jenis Penelitian .....	43
3.1    Sumber Data .....	44
3.2.1    Data Primer .....	44
3.2.2    Data Sekunder .....	44
3.2    Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
3.3    Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.4    Teknik Analisis Data.....	46
3.5    Tahapan Penelitian.....	48
<b>BAB IV .....</b>	<b>50</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1    Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
4.1.1    Sejarah Pembentukan BKAD Provinsi Kalimantan Barat.....	50
4.1.2    Visi, Misi, & Motto .....	51
4.1.3    Struktur Organisasi .....	52
4.2    Hasil Penelitian.....	56
4.2.1    Perbandingan Anggaran yang ditetapkan dengan Realisasi.....	57
4.2.2    Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBD.....	64
4.2.3    Analisis Perhitungan SILPA.....	66
4.2.4    Hasil Wawancara.....	68
4.3    Pembahasan .....	77
4.3.1    Pola dan Tren SILPA 2019-2023 .....	77
4.3.2    Faktor-Faktor Penyebab terjadinya SiLPA .....	79
4.3.3    Penyebab Terjadinya Fluktuasi Pada Nilai SILPA .....	82
4.3.4    Dampak SILPA .....	85
4.3.5    Evaluasi dan Pengawasan SILPA .....	86
4.3.6    Upaya Pengendalian SILPA.....	87
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
5.1    Kesimpulan.....	89
5.2    Saran.....	90

5.3 Keterbatasan Penelitian .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Perkembangan SILPA Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023 (dalam triliun rupiah).....	5
Grafik 4. 1 Fluktuasi SILPA.....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Struktur APBD .....	12
Tabel 2. 2 Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD .....	30
Tabel 2. 3 Kajian Empiris.....	33
Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran 2019.....	57
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran 2020.....	59
Tabel 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran 2021.....	60
Tabel 4. 4 Laporan Realisasi Anggaran 2022.....	61
Tabel 4. 5 Laporan Realisasi Anggaran 2023.....	62
Tabel 4. 6 Pelampauan Pendapatan Daerah .....	64
Tabel 4. 7 Sisa Belanja Daerah .....	65
Tabel 4. 8 SiLPA Tahun Anggaran 2019-2023.....	66
Tabel 4. 9 Hasil Wawancara .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	42
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 2000, beberapa kewenangan pemerintah pusat mulai didesentralisasikan ke daerah. Tujuannya mendekatkan pemerintah daerah dengan rakyat melalui pengembangan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing, agar bisa mengatasi kesenjangan perimbangan fiskal antar daerah. Desentralisasi memiliki peran krusial dalam mengatasi ketimpangan perimbangan fiskal antar daerah. Selain itu, desentralisasi juga berkontribusi pada pembangunan nasional dengan mempertimbangkan kekayaan alam, budaya, dan adat istiadat yang beragam di setiap daerah. Tujuan dari penerapan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang ada, sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di tingkat daerah, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia diatur melalui serangkaian peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan selanjutnya mengalami perubahan kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memberikan keleluasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola pemerintahannya secara lebih mandiri dan efektif. Perubahan ini merupakan penyerahan wewenang pemerintahan secara desentralisasi oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perwujudan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dengan Perda. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup seluruh pendapatan dan pengeluaran untuk satu tahun anggaran, juga sebagai alat mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu APBD juga menjadi sarana bagi pemangku kepentingan tertentu untuk mengidentifikasi dan memahami kapasitas daerah baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. APBD dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/barang yang melaksanakan satu atau beberapa program dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD, atau dokumen yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang menjalankan fungsi bendahara umum daerah. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan APBD. Serta dilanjutkan dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Sekecil apapun pelaksanaan APBD harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan dalam segala kegiatannya. Oleh karena itu dimulai dari proses perencanaan perlu dilakukan evaluasi, pelaksanaan tujuan secara bertahap untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang tidak mengarah pada pencapaian tujuan. Sehingga dalam perumusan anggaran APBD terlebih dalam implementasinya oleh satuan-satuan kerja perangkat daerah harus benar-benar terukur, termasuk waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan program (Wowor *et al.*, 2023)

Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk menyejahterakan masyarakat di daerahnya. Pada hakikatnya mengelola keuangan daerah adalah mengelola anggaran, sehingga pemerintah harus melakukan perencanaan dan penganggaran dengan tepat. Pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LKPD. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bagian dari LKPD yang menyajikan kinerja pemerintah dalam mengelola dana publik. LRA menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian, laporan ini juga mencakup selisih antara realisasi dan capaian anggaran yang telah ditentukan, selisih tersebut terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA terjadi hampir disetiap pemerintahan di Indonesia. SiLPA dapat terjadi karena realisasi pendapatan

melebihi target atau melebihi anggaran yang telah ditentukan dan realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditentukan..

Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dapat menyebabkan terjadinya surplus atau defisit dalam APBD. Dalam proses penyusunan APBD, seharusnya SiLPA harus sama dengan angka nol, yang menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan harus cukup untuk menutupi defisit anggaran. Jika SiLPA bernilai positif, ini menunjukkan adanya pembiayaan bersih setelah defisit anggaran, yang berarti masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang belum digunakan untuk membiayai belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Sebaliknya, jika SiLPA bernilai negatif, maka pembiayaan netto tidak cukup untuk menutupi defisit anggaran yang ada. Oleh karena itu, perlu dicari solusi, seperti mencari sumber pembiayaan lain, utang, atau melakukan pemotongan belanja dan pengeluaran pembiayaan agar nilai SiLPA dapat mencapai nol.

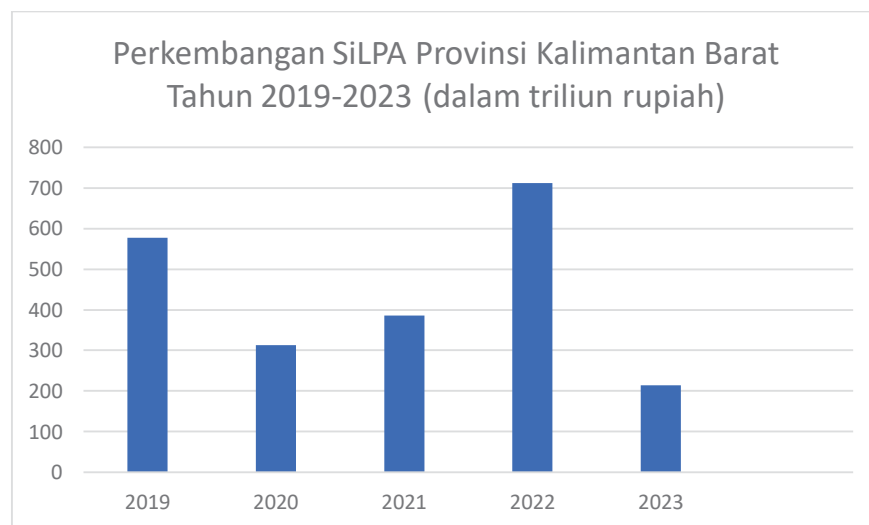
SiLPA berfungsi sebagai penghubung antara APBD tahun anggaran sebelumnya dan APBD tahun anggaran yang akan datang. SiLPA muncul pada akhir tahun anggaran (31 Desember) dan awal tahun anggaran baru (1 Januari), sebelum aktivitas pendapatan daerah dimulai. Di dalam kas daerah telah tersedia uang kas yang secara langsung merupakan bagian dari SiLPA tahun sebelumnya. SiLPA ini akan dimasukkan ke dalam APBD sebagai sumber penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya. SiLPA memiliki dampak pada pengalokasian APBD di periode selanjutnya, karena akan digunakan untuk menyeimbangkan anggaran dengan menutupi pengeluaran pembiayaan. Selain itu, SiLPA juga dapat muncul akibat adanya asimetri informasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Besarnya surplus dan defisit dalam suatu anggaran dapat mempengaruhi kinerja pemerintah.

Sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, perhitungan anggaran daerah juga berfungsi sebagai alat analisis laporan keuangan pemerintah. Melalui analisis laporan keuangan ini, informasi mengenai surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja dapat

diperoleh, yang mencerminkan hasil yang dicapai selama periode tertentu (satu tahun anggaran). Dari perhitungan ini, dapat dilihat apakah penerimaan yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan dalam penyusunan anggaran dapat terealisasi. Pada sisi pengeluaran juga akan terlihat apakah pengeluaran atas dana yang telah dianggarkan pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung telah dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan hasil kajian dari Analisa dan informasi dari kunjungan lapangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hampir setiap tahun melaporkan SiLPA. Pada tahun anggaran 2019-2023 perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, terjadi penurunan tajam pada tahun 2019-2021, lalu terjadi kenaikan tinggi pada tahun 2022 namun terjadi penurunan lagi pada tahun 2023. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam grafik sebagaimana sebagai berikut.

Grafik 1. 1 Perkembangan SILPA Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023 (dalam triliun rupiah)



Sumber : Data LRA Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 (diolah)

Nominal SiLPA Provinsi Kalimantan Barat tercatat cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp577.262.139.696,17, tahun 2020 Rp313.019.167.918,62, tahun 2021 Rp386.160.584.507,87, tahun 2022 Rp712.768.098.535,12, dan tahun 2023

Rp214.161.066.942,44. Dengan adanya SiLPA yang cukup tinggi membuat capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan APBD mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan di ekonomi daerah. Fenomena tersebut perlu untuk dianalisis mengingat selain mempengaruhi hasil penilaian Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka perlu dilaksanakan penelitian lebih jauh serta evaluasi yang ditujukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya SiLPA yang cukup tinggi dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya SiLPA dalam pengelolaan APBD menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya GAP pada hasil penelitian, yaitu pada penelitian Fitri Amelia *et al.*, (2022), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan APBD sudah baik dan efisien. Sedangkan keberadaan SiLPA disebabkan oleh efisiensi pengeluaran dan pendapatan lebih. Kemudian penelitian dari Safira Solga Safitri *et al.*, (2022), Hasil lainnya menunjukkan penyebab adanya SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri atas pelampauan pendapatan dan sisa anggaran belanja serta terdapat dampak adanya SiLPA terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya pada pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menutup defisit dan membiayai program prioritas yang belum dianggarkan pada proses APBD awal yang harus digunakan dalam tahun anggaran berikutnya serta pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran sesuai peruntukannya. Selanjutnya Penelitian Mochammad Fitroh *et al.*, (2016) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara SiLPA dengan penetapan anggaran tahun berikutnya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dalam hal ini Negara dan Daerah memerlukan sumber pembiayaan yang cukup besar. Sumber pembiayaan ini kemudian harus dialokasikan untuk

berbagai sektor prioritas dan strategis. Beberapa jenis Pembiayaan yang perlu digali secara optimal yang kemudian dialokasikan ke semua sektor melalui suatu proses atau mekanisme pembiayaan negara yang cukup kompleks. Tidak optimalnya penggalan sumber-sumber pembiayaan negara dan daerah akan mengganggu mekanisme pembiayaan secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, faktor penyebab terjadinya SiLPA dan Tingkat Perumbuhan SiLPA dalam waktu kurun 5 tahun terakhir sebagai alat ukur kinerja pemerintah sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan yang efisien. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas topik ini dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019-2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta-fakta di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA dalam waktu kurun 5 tahun terakhir pada Laporan Realisasi APBD (2019-2023)?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi nilai SILPA?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA dan faktor yang menyebabkan terjadinya nilai fluktuasi pada SiLPA dalam waktu kurun 5 tahun terakhir pada Laporan Realisasi APBD (2019-2023) dan sebagai alat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran serta efisiensi penggunaan anggaran publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan tetap terfokus, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas, yaitu dengan memfokuskan faktor penyebab terjadinya SiLPA dalam pengelolaan APBD sebagai alat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian mengenai penerapan sistem pengendalian internal dapat diharapkan memberikan manfaat, antara lain :

- 1) Kontribusi Teoritis :
  - a. Diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dan juga literasi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi.
  - b. Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam perbandingan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- 2) Kontribusi Praktis :
  - a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran publik.
  - b. Bagi Universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bacaan khususnya dalam program studi akuntansi.
  - c. Bagi BKAD Provinsi Kalimantan Barat, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor faktor yang terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).